

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1. Simpulan

Sentralisme pemerintahan yang telah lama berlangsung di negeri ini, cenderung dianggap sebagai penghambat pembangunan daerah. Dari sekian banyak tuntutan yang diperhadapkan menyongsong reformasi, maka salah satu solusi yang dianggap paling mendesak untuk menjawab persoalan yaitu diupayakan dengan pemekaran daerah. Kesempatan memekarkan daerah segera meluas ke seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, muncullah daerah-daerah otonom yang menjalankan wewenangnya dalam mengurus pembangunan. Sejumlah daerah di Indonesia—baik provinsi maupun kabupaten dan kota—telah dimekarkan.

Dibandingkan dengan pemekaran yang telah berlangsung di wilayah Sumatera Utara, Kabupaten Simalungun tergolong ketinggalan karena tidak segera (bahkan belum) dimekarkan. Kabupaten Simalungun dianggap sebagai kabupaten yang kalah langkah dalam mengikuti perkembangan daerah-daerah lain secara umum di Indonesia dan secara khusus di Sumatera Utara. Padahal, sebelum kabupaten-kabupaten besar itu dimekarkan, Kabupaten Simalungun sudah tergolong sebagai kabupaten yang terluas di Sumatera Utara. Dari segi luas wilayahnya, menurut tim pendukung pemekaran, sudah semestinya Kabupaten

Simalungun turut dimekarkan. Pemekaran yang telah terealisasi pada kabupaten-kabupaten tetangga Simalungun, mendorong keinginan yang kuat pada masyarakat di kabupaten ini untuk memekarkan wilayahnya agar membentuk kabupaten baru yakni Kabupaten Simalungun Hataran.

Argumen yang paling memberi alasan agar pemekaran segera dilakukan, terutama ialah karena wilayah Simalungun Bawah dianggap sudah selayaknya dimekarkan. Lahirnya gagasan pemekaran Kabupaten Simalungun ialah karena pemerintah Kabupaten Simalungun yang selama ini dinilai tidak melakukan pembangunan yang merata di segala bidang dan di semua wilayahnya.

Memasuki era otonomi daerah, pembangunan daerah-daerah yang berada di wilayah Kabupaten Simalungun tampak tidak merata. Selama ini pembangunan lebih terpusat di ibukota kabupaten yang masih terletak di Pematangsiantar (saat ini telah menjadi kota yang otonom, terpisah secara administratif dengan Simalungun). Kemudian, ibukota Kabupaten Simalungun dipindahkan ke Pamatang Raya. Kenyataan ini semakin memperkuat keyakinan bahwa Pamatang Raya sengaja dipersiapkan sebagai ibukota kabupaten induk serta mendukung upaya pemekaran Kabupaten Simalungun. Ketimpangan pembangunan yang terjadi antara wilayah Simalungun Atas dengan wilayah Simalungun Bawah berpotensi melahirkan kecemburuan yang dapat berakibat konflik dan ketegangan antar masyarakatnya.

Pendapat dari beberapa informan kalangan pendukung pemekaran menyatakan bahwa wacana pemekaran Kabupaten Simalungun sudah mulai muncul sejak reformasi bergulir. Kecuali beberapa pendukung pemekaran tertentu

lainnya, malah menyatakan bahwa gagasan mengenai pemekaran Kabupaten Simalungun sudah muncul sejak pemisahan Pematangsiantar yang menjadi kotamadya terlepas secara administratif dari Kabupaten Simalungun sekitar tahun 1960-an.

Wacana pemekaran Kabupaten Simalungun ini muncul mengingat wilayahnya yang luas sementara jangkauan pembangunan tidak merata hingga ke seluruh pelosok Simalungun. Pada kesempatan yang bersamaan, kabupaten-kabupaten tetangga Simalungun juga melangsungkan proses pemekaran. Oleh karenanya, momentum implementasi Undang-Undang 32 Tahun 2004 yang ditandai dengan banyaknya daerah dimekarkan, mengisyaratkan bahwa Kabupaten Simalungun sudah layak untuk dimekarkan supaya pembangunan dapat merata dan penyerapan anggaran dana pembangunan dapat lebih besar lagi. Pemekaran Simalungun juga diyakini sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat

Pada wacana pemekaran Kabupaten Simalungun dikehendaki penentuan batas kewilayahan dengan cara membagi dua Kabupaten Simalungun. Bagi para penggagas pemekaran, ide membagi dua wilayah ini tidak terlalu rumit kecuali secara teknis menentukan tapal batas daerah setiap kecamatan yang akan dipisahkan. Secara historis, wilayah Kabupaten Simalungun sudah terpola menjadi „atas“ dan „bawah“. Akan tetapi, sejak dahulu belum pernah ada tapal batas yang tegas sebagai penanda untuk memisahkan dua pola wilayah Kabupaten Simalungun ini. Jika dirunut berdasarkan sejarah Simalungun, maka wilayah

Simalungun Bawah, seyogyanya, jauh lebih luas daripada wilayah Simalungun Atas. Keadaan ini yang sering dimaknai sebagai pengkerdilan *Tanoh* Simalungun—di mana wilayah yang didiami oleh orang Simalungun asli menjadi semakin sempit—oleh peran Kolonial Belanda dan besarnya arus pendatang. Dalam kasus yang terjadi pada wacana pemerakan Kabupaten Simalungun dengan mengambil langkah membelah wilayahnya menjadi dua bagian, persoalan etnisitas menjadi terbentur.

Keberagaman etnis di *Tanoh* Simalungun dengan dominasi pendatang pada lembaga strategis yang menguasai pemerintahan menjadi potensi masalah berkaitan dengan situasi otonomi daerah. Persaingan dan gesekan antara orang Simalungun sebagai etnis asli di daerah ini dengan para pendatang ibarat „bara dalam sekam“—yang meskipun tidak tampak secara jelas dari luar, namun menyimpan benih konflik yang telah lama terbangun. Benih konflik bukan hanya sejak didatangkannya migran (yang kemudian menjadi saingan) dari luar Simalungun untuk menetap dan mengusahai daerah ini, namun juga lahir akibat trauma konflik berdarah yang terjadi pada masa Revolusi Sosial 1946 yang menghantam kaum bangsawan di wilayah Sumatera Timur.

Penguatan eksistensi identitas etnis Simalungun semakin meningkat di kalangan masyarakat Simalungun. Semangat „kesimalungunan“ meningkat sejalan dengan perbincangan tentang landasan *Ahap* dan *Habonaron Do Bona* yang semakin meluas. Pemekaran itu adalah bermaksud membentuk atau membagi Simalungun menjadi dua bagian wilayah. Hal ini menjadi peristiwa yang baru bagi Simalungun. Oleh karenanya dapat mengundang pro dan kontra, sama halnya

dengan Revolusi Sosial yang terjadi pada 1946. Bagaimanapun, ancaman bagi Simalungun menjadi tampak jelas seiring meningkatnya eskalasi perjuangan pemekaran Kabupaten Simalungun. Wacana pemekaran dan proses pembelahan wilayahnya dianggap sebagai ancaman bagi eksistensi Simalungun di masa depan. Sementara para penggagas dan pendukung pemekaran Kabupaten Simalungun yang menghendaki berdirinya Kabupaten Simalungun Hataran dianggap sebagai lawan bagi orang Simalungun.

Masyarakatnya mengakui, bahwa *ahap* Simalungun merupakan prinsip yang melandasi jiwa orang Simalungun. Bukan suatu prinsip yang dikonsepsi dengan sederhana dan bernilai murahan. Prinsip hidup orang Simalungun tersebut diakui sebagai prinsip yang kuat, teguh dan tahan uji. Sehingga, jika ada yang mengatakan bahwa pemekaran dan pembelahan wilayah Kabupaten Simalungun dapat menghancurkan „kesimalungunan“, justru sepatutnyalah dipertanyakan *ahap* Simalungun dari orang tersebut. Orang Simalungun yang anti terhadap pemekaran Kabupaten Simalungun karena diliputi anggapan bahwa pemekaran akan membawa petaka bagi Simalungun, dituding oleh pendukung pemekaran agar membersihkan diri dengan *ahap* Simalungun dan *Habonaron Do Bona*.

Identitas Simalungun yang sudah sedemikian terkonstruksi berkat berdirinya lembaga, organisasi dan komunitas „kesimalungunan“), dikuatkan lagi dengan berbagai propaganda yang mempererat persatuannya. Dikatakan bahwa yang mempersatukan Simalungun hanya ada satu, yaitu kata „Simalungun“. Dengan cara ini, Simalungun Hataran menjadi kekeliruan di benak orang Simalungun. Dikaitkan lagi dengan peribahasa “bersatu kita teguh, bercerai kita

rubuh”, selanjutnya memberikan pengertian yang tegas bahwa upaya pemekaran dan pembelahan wilayah dianggap sebagai permainan para pecundang. Sebab dikatakan tidak mungkin pihak Simalungun sendiri mengingkari falsafah Simalungun *Habonaron Do Bona*—yang seharusnya dipegang teguh.

Kemudian berkembang stigma di kalangan masyarakat Simalungun yang meragukan „kesimalungunan“ seseorang berdasarkan penggunaan bahasa Simalungun. Jika seseorang mengaku Simalungun namun tidak dapat berbahasa Simalungun, maka identitasnya diragukan. Demikian juga terhadap orang Simalungun (atau yang mengaku Simalungun) namun tidak memahami sejarah Simalungun. Perihal penggunaan bahasa Simalungun ini menjadi sorotan bagi kalangan budayawan Simalungun dalam rangka *patuduhkon hasadaon* (menunjukkan eksistensi, persatuan dan kesatuan) Simalungun sebagai etnis yang berjaya di tanahnya sendiri.

Selanjutnya berkembang propaganda yang diprakarsai oleh kalangan budayawan dan tokoh Simalungun dalam menghadapi upaya pemekaran dan pembelahan wilayah Kabupaten Simalungun. Landasan *ahap* Simalungun dan falsafah *Habonaron Do Bona* dilegitimasi sebagai landasan berpikir jika ingin membenahi *Tanoh* Simalungun atau menghendaki pembangunan dan pengembangan terhadap kemakmuran wilayahnya. Dengan landasan yang dimaksud itu, tidak akan ada upaya curang yang berakibat merugikan Simalungun dalam aspek kesatuan budaya dan kesatuan wilayahnya. Orang Simalungun yang asli lebih diakui karena terdapat landasan itu dalam dirinya. Jika seseorang mau

insyaf dan menyadari bahwa dirinya adalah Simalungun, hendaknya membersihkan diri dengan landasan tersebut.

Tanggapan beberapa masyarakat Simalungun wilayah Simalungun Bawah sedikit berbeda dengan pernyataan di atas. Bagi orang Simalungun di Simalungun Bawah, garis keturunan (memiliki marga Simalungun) dianggap sudah cukup menjelaskan bahwa mereka adalah Simalungun. Khusus di wilayah Simalungun Bawah, merekalah yang menjadi *simada talun* (tuan rumah, pemilik wilayah Simalungun Bawah). Lebih lanjut, pernyataan tersebut menggambarkan pandangan yang tidak sejalan dengan maksud orang-orang Simalungun yang menganggap dirinya asli. Muncul anggapan bahwa yang menjadi Simalungun asli hanyalah mereka yang berada di wilayah Raya dan daerah sekitarnya. Orang Simalungun adalah mereka yang lahir di Raya dan daerah sekitarnya, harus bisa berbahasa Simalungun, dan memahami adat budaya Simalungun. Yang berarti bahwa, jika ingin dikatakan sebagai orang Simalungun asli, orang Simalungun Bawah harus „insyaf“, kembali ke Simalungun dan berkehidupan di Simalungun. Sehingga hal ini menjadi bagian terkecil dari alasan yang mendorong orang Simalungun Bawah yang tidak masuk dalam kriteria tersebut menginginkan Kabupaten Simalungun dimekarkan, lalu menyatakan diri sebagai „Simalungun Hataran“.

Persoalan identitas yang semakin meruncing ditandai dengan anggapan bahwa orang Simalungun yang menginginkan pemekaran adalah Simalungun gadungan (palsu). Sekali lagi yang dikatakan sebagai orang Simalungun asli ialah yang hidupnya dilandasi oleh *ahap* dan *Habonaron Do Bona*. Oleh karena adanya

ahap, maka demi kesatuan Simalungun, apapun akan dilakukan. Bahkan bersedia mati demi mempertahankan harga diri Simalungun tersebut. Akan tetapi dianggap tidak mungkin jika sesama orang Simalungun saling berperang hanya oleh karena pemekaran. Tegasnya, musuh Simalungun adalah mereka yang menggagas dan mendukung wacana pemekaran serta pembelahan wilayah Kabupaten Simalungun.

Sejalan dengan itu, berkembang celaan di tengah masyarakat yang menyatakan bahwa seharusnya pula orang Simalungun malu karena terikut dalam gerakan dan upaya pemekaran yang dianggap menghancurkan kesatuan Simalungun. Penolakan terhadap wacana pemekaran Kabupaten Simalungun merupakan sebuah gejala yang lahir sebagai dinamika dari konstruksi identitas etnis Simalungun.

6.2. Saran

Gejolak identitas etnis Simalungun terbentuk sebagai konsekuensi daripada isu pembelahan wilayah yang direncanakan dalam wacana pemekaran Kabupaten Simalungun. Ketegangan antar etnis yang mengancam keharmonisan, kiranya dapat menjadi pelajaran yang berharga bagi pendewasaan politik masyarakat di kabupaten ini. Setidaknya, beberapa hal menjadi terbangun dalam kesadaran kolektif antar kelompok masyarakat. Ketegangan etnisitas mendorong secara sadar pembelajaran sejarah dan kebudayaan bagi masyarakat Simalungun yang sedang bergiat dalam membangun konstruksi identitas etnisnya. Di samping itu, turut memberikan pelajaran yang mengingatkan sejarah tentang asal-usul etnis

asli terhadap masyarakat pendatang di *Tanoh* Simalungun. Melalui proses ini, kiranya setiap masyarakat (khususnya pendatang) berkenan saling menghargai terhadap identitas budaya di lingkungan tempat tinggalnya.

Gejolak identitas etnis yang dapat menyulut sentimen antar etnisitas harus direspon secara tanggap dan bijak oleh pemerintah. Keruntuhan Uni Soviet misalnya, telah menjadi bukti diakibatkan karena gagalnya penguasa merespon gerakan etnik di negara-negara federasinya. Kerapuhan “tali pengikat” (kohesi) dalam masyarakat Kabupaten Simalungun akan selamanya dapat menyuburkan gejolak identitas etnis yang berujung pada perpecahan antar etnis. Oleh karenanya, setidaknya, kohesi ideologis dan pragmatis harus dimantapkan di daerah Kabupaten Simalungun. Kohesi ideologis ialah menyangkut persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI. Sedangkan kohesi pragmatis berkenaan dengan kebebasan, kesejahteraan, dan keadilan. (lihat : Tikwan R. Siregar dalam Simanjuntak *et.al.* 2012:44-45).

Sebuah langkah yang praktis guna menyikapi tuntutan pemekaran yang berujung pada terancamnya keharmonisan masyarakat di Kabupaten Simalungun, ialah pentingnya melaksanakan pembangunan secara adil dan merata. Dalam hal ini, pemerintahan Kabupaten Simalungun dapat menampung aspirasi secara berimbang dari seluruh masyarakat Simalungun di berbagai pelosok wilayahnya. Berdasarkan aspirasi tersebut, maka aplikasi pembangunan yang menyentuh langsung (partisipatif dan berdampak) kepada kebutuhan masyarakat harus dilaksanakan secara transparan. Menjamin kesejahteraan masyarakat akan turut memelihara keharmonisan di dalam masyarakat itu sendiri.

Menyadari bahwa penelitian antropologis ini masih jauh dari sempurna, maka penting kiranya dilakukan penelitian yang lebih lanjut terhadap persoalan seputar identitas etnis di Kabupaten Simalungun serta di berbagai daerah lainnya. Persoalan etnisitas tentunya memiliki cakupan yang luas, sehingga dapat dikaji dengan mengambil salah satu atau beberapa aspek yang sesuai dengan minat peneliti berikutnya.

